



**PENGARUH PENDIDIKAN, PDRB DAN PENANAMAN
MODAL ASING TERHADAP PENGANGGURAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh
ADITIYA UTAMA
110810101068

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH PENDIDIKAN, PDRB DAN PENANAMAN
MODAL ASING TERHADAP PENGANGGURAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh
ADITIYA UTAMA
110810101068

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH PENDIDIKAN, PDRB DAN PENANAMAN
MODAL ASING TERHADAP PENGANGGURAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
ADITIYA UTAMA
110810101068

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

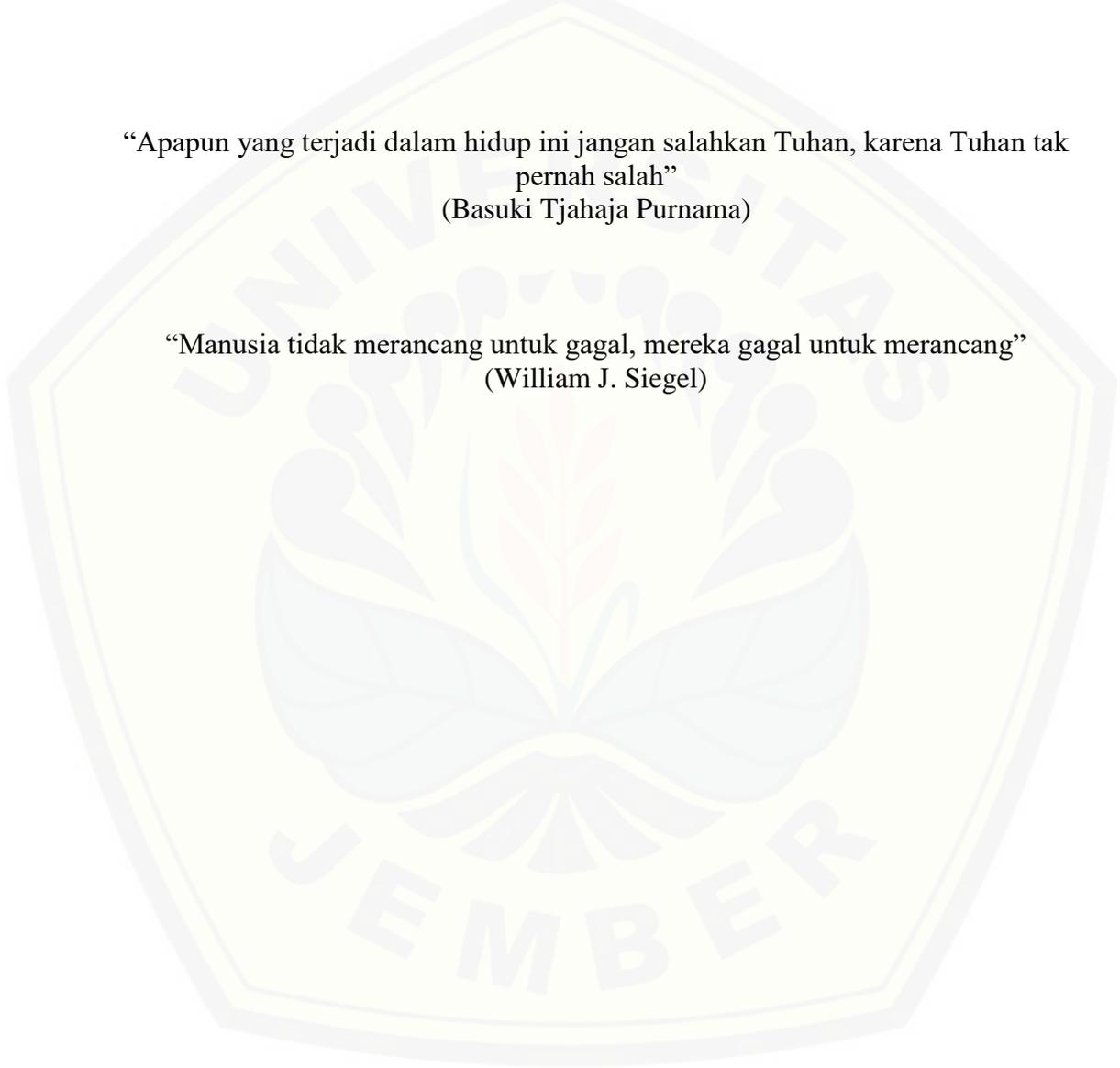
1. Ibunda Ribus Supriyati dan Ayahanda Atim Prasiknyo tercinta yang senantiasa telah memberikan iringan doa di setiap perjalanan hidup penulis, memberikan kasih sayang, semangat, pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga”
(Albert Einstein)

“Apapun yang terjadi dalam hidup ini jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan tak pernah salah”
(Basuki Tjahaja Purnama)

“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang”
(William J. Siegel)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Utama

NIM : 110810101068

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pendidikan, PDRB dan PMA Terhadap Pengangguran di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2018

Yang menyatakan,

Aditya Utama
NIM. 110810101068

SKRIPSI

**PENGARUH PENDIDIKAN, PDRB DAN PENANAMAN MODAL ASING
TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA**

Oleh

Aditya Utama

NIM 110810101068

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. M. Fathorrazi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Aisah Jumiati, SE., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pendidikan, PDRB dan Penanaman Modal
Asing terhadap Pengangguran di Indonesia
Nama Mahasiswa : Aditiya Utama
NIM : 110810101068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 14 Mei 2018

Pembimbing I

Dr. M. Fathorrazi. SE, Msi
NIP.196306141990021001

Pembimbing II

Aisah Jumiati, S.E., M.P.
NIP.196809261994032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi
Pengaruh Pendidikan, PDRB dan Penanaman Modal Asing terhadap
Pengangguran di Indonesia

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aditya Utama

NIM : 110810101068

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal :

08 Juni 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof.Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. (.....)
NIP. 195608311984031002
2. Sekretaris : Dr. Riniati, M.P. (.....)
NIP. 196004301986032001
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196907181995122001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 x 6

warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak. CA
NIP. 197107271995121001

Pengaruh Pendidikan, PDRB dan PMA Terhadap Pengangguran di Indonesia

Aditiya Utama

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja (BPS). Mengatasi permasalahan pengangguran tidak dapat dilakukan terpisah dari faktor yang mempengaruhi seperti : pendidikan, PDRB dan PMA serta faktor lainnya. Presentase pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, meningkat di tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2016. Sedangkan persentase pengangguran untuk 33 provinsi di Indonesia masih mengalami fluktuasi. Studi ini meneliti tentang pengaruh pendidikan, PDRB dan PMA terhadap pengangguran di 33 provinsi di Indonesia tahun 2010-2016. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisa seberapa besar dan bagaimana pengaruh variabel pendidikan, PDRB dan PMA terhadap pengangguran di 33 provinsi di Indonesia sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS serta *browsing website internet* sebagai pendukung. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan metode *FEM* dengan bantuan *software Eviews 9*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dan PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran.

Kata kunci : Pengangguran, Pendidikan, PDRB, PMA

The effect of education, GRDP and PMA on unemployment in Indonesia

Aditiya Utama

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Ekonomi and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

Unemployment is unemployed but is looking for a job or is preparing a new business or a resident who is not looking for a job because it has been accepted but has not yet begun work (BPS). Overcoming the problem of unemployment can not be done separately from influencing factors such as: education, GRDP and PMA and other factors. The percentage of unemployed in Indonesia has declined from 2010-2014, rising in 2015 and declining again in 2016. While the percentage of unemployment for 33 provinces in Indonesia is still fluctuating. This study examines the effect of education, GRDP and PMA on unemployment in 33 provinces in Indonesia 2010-2016. The purpose of this study is expected to analyze how big and how the influence of variables education, GRDP and PMA against unemployment in 33 provinces in Indonesia so that later it is expected to be used as one of the basis in determining policy in overcoming the problem of unemployment in Indonesia. The data used in this study is secondary data obtained from BPS serra browsing internet website as a supporter. While the method used in this research is the method of panel data regression analysis with FEM method with the help of software Eviews 9. The results of this study showed that education variables have a negative and significant effect on unemployment, GRDP variables have a negative and significant impact on unemployment and PMA berpengaruh negative and not significant to unemployment.

Keywords: Unemployment, Education, GRDP, PMA

RINGKASAN

Pengaruh Pendidikan, PDRB dan Penanaman Modal Asing terhadap Pengangguran di Indonesia; Aditiya Utama; 110810101068: Halaman 77; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendidikan, PDRB dan PMA Terhadap Pengangguran di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap pengangguran di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2010-2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 33 data provinsi di Indonesia yang menghasilkan 231 observasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui apakah variabel pendidikan, PDRB dan PMA berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.

Hasil dari analisis regresi data panel adalah Nilai konstanta pengangguran sebesar 10,009, nilai tersebut menunjukkan bahwa pengangguran sebesar 10,009 persen apabila variabel pendidikan, PDRB dan PMA konstan. Pengaruh signifikan pendidikan terhadap pengangguran dengan konstanta sebesar -0,055 yang artinya apabila terjadi kenaikan pendidikan sebesar satu persen maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0,055 persen. Pengaruh signifikan PDRB terhadap pengangguran dengan konstanta sebesar -5,33 yang artinya apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar satu miliar rupiah maka akan menurunkan pengangguran sebesar 5,33 persen. Pengaruh tidak signifikan PMA terhadap pengangguran dengan konstanta sebesar -0,0001 yang artinya apabila terjadi kenaikan PMA sebesar satu juta US\$ maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0,0001 persen.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul Pengaruh Pendidikan, PDRB dan PMA Terhadap Pengangguran di Indonesia bisa diselesaikan. Shalawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini berguna bagi Pemerintah, serta dapat memberikan sumbangan bagi pembacanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengangguran	12
2.1.1 Definisi Pengangguran.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Pengangguran	13
2.1.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengangguran	15
2.1.4 Akibat Pengangguran.....	16
2.2 Pendidikan	17
2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20

2.3.1	Definisi PDRB	20
2.3.2	Perhitungan PDRB	21
2.4	Penanaman Modal Asing (PMA)	22
2.5	Hubungan Antar Variabel.....	25
2.5.1	Hubungan Antara Pendidikan (X_1) terhadap Pengangguran (Y)	25
2.5.2	Hubungan Antara PDRB (X_2) terhadap Pengangguran (Y)	25
2.5.3	Hubungan Antara PMA (X_3) terhadap Pengangguran (Y)	26
2.6	Penelitian Terdahulu	26
2.7	Kerangka Konseptual	31
2.8	Hipotesis.....	32
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN		33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.3	Jenis dan Sumber Data	34
3.4	Unit Analisis.....	34
3.5	Metode Analisis.....	35
3.5.1	Metode Analisis Data Panel.....	35
3.5.2	Permodelan Data Panel.....	36
3.5.3	Pemilihan Model Data Panel	37
3.5.4	Model Empiris	39
3.6	Uji Statistik.....	40
3.6.1	Uji Secara Simultan (Uji F)	40
3.6.2	Uji Parsial (Uji t)	41
3.7	Koefisien Determinasi	41
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.1	Uji Normalitas	42
3.7.2	Uji Multikolinearitas	42
3.7.3	Uji Heterokedastisitas.....	43

3.9	Definisi Operasional	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum.....	45
4.1.1	Keadaan Geografis Wilayah Indonesia	45
4.1.2	Deskripsi Pengangguran di Indonesia	46
4.1.3	Deskripsi Pendidikan di Indonesia	47
4.1.4	Deskripsi PDRB di Indonesia	48
4.1.5	Deskripsi Penanaman Modal Asing Di Indonesia.....	51
4.2	Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel	52
4.2.1	Uji Chow	52
4.2.2	Uji Hausman.....	53
4.3	Hasil Penelitian Analisis Data Panel.....	53
4.4	Uji Statistik.....	54
4.4.1	Uji Secara Simultan (Uji F)	54
4.4.2	Uji Parsial (Uji t)	55
4.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
4.6	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.6.1	Uji Normalitas	56
4.6.2	Uji Multikolinearitas	57
4.6.3	Uji Heterokedastisitas	57
4.7	Pembahasan	58
4.7.1	Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengangguran di Indonesia	58
4.7.2	Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran di Indonesia...59	
4.7.3	Pengaruh PMA Terhadap Pengangguran di Indonesia60	
BAB 5 PENUTUP.....		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan 2010 di Indonesia tahun 2010-2016.....	5
Tabel 1.2 Realisasi PMA di Indonesia tahun 2010-2016	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2010-2016	50
Tabel 4.2 Uji Chow	52
Tabel 4.3 Uji Hausman	53
Tabel 4.4 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	54
Tabel 4.5 Uji t	55
Tabel 4.6 Uji Determinan(R^2)	55
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Gambar 1.2 Pengangguran di Indonesia tahun 2010-2016.....	2
Gambar 1.3 Pendidikan di Indonesia tahun 2010-2016.....	4
Gambar 1.4 PDB harga konstan 2010 di Indonesia tahun 2010-2016	6
Gambar 1.5 Realisasi PMA di Indonesia tahun 2010-2016	8
Gambar 2.1 Kurva Hukum Okun	25
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 4.1 Peta Administratif Wilayah Indonesia	46
Gambar 4.2 Pengangguran di Indonesia Tahun 2010-2016	47
Gambar 4.3 Pendidikan SMA di Indonesia tahun 2010-2016.....	48
Gambar 4.4 PDB Harga Konstan 2010 di Indonesia tahun 2010-2016.....	51
Gambar 4.5 Realisasi PMA di Indonesia tahun 2010-2016	52
Gambar 4.6 Uji Normalitas.....	56

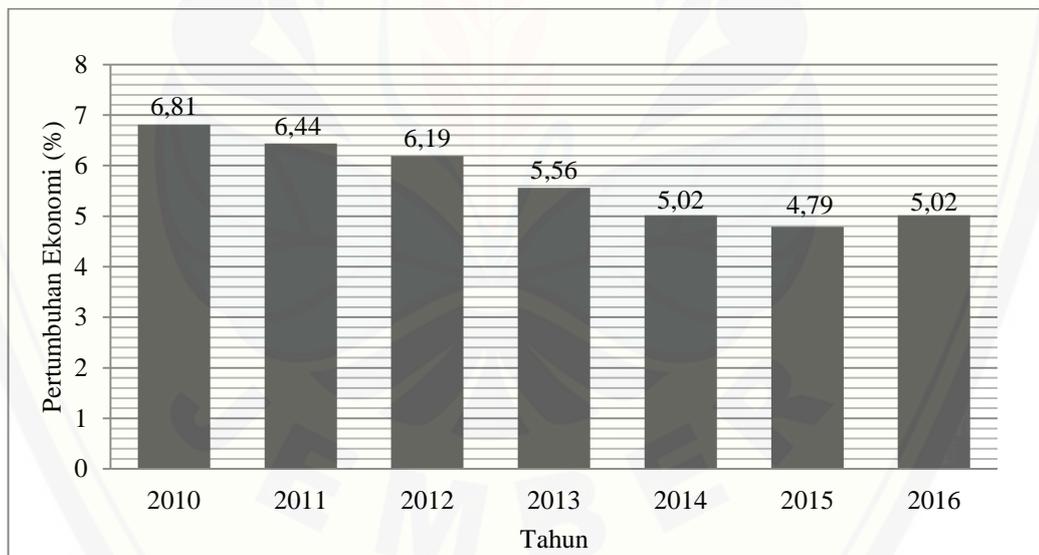
DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A	Data Variabel Pendidikan di Indonesia Tahun 2010-201668
Lampiran B	Data Variabel PDRB di Indonesia Tahun 2010-2016.....69
Lampiran C	Data PMA di Indonesia Tahun 2010-201670
Lampiran D	Data Variabel Pengangguran di Indonesia Tahun 2010-201671
Lampiran E	Uji Chow72
Lampiran F	Uji Hausman73
Lampiran G	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>74
Lampiran H	Uji Normalitas75
Lampiran I	Uji Multikolinearitas76
Lampiran J	Uji Heterokedastisitas77

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia tergolong negara berkembang yang sedang dalam proses pertumbuhan atau dengan kata lain disebut sedang membangun atau *development country*. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor tersier ke sektor sekunder (PDRB, 2016: 3). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Data tentang pertumbuhan ekonomi terdapat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-2016
Sumber: BPS Indonesia, 2017

Dilihat dari Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang paling rendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,79 persen.

Pengangguran adalah suatu masalah yang dihadapi semua negara di dunia sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja yang

masuk dalam angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja (Astuti, 2014: 10). Pengangguran selalu menjadi salah satu dari prioritas masalah yang harus dihadapi dalam setiap perencanaan pembangunan. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu Negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk masyarakat yang menganggur yang berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuelsen, 2008: 363-364).

Selain itu masalah lain yang timbul adalah ketidakstabilan politik, angka kriminalitas yang akan terus bertambah, dimana hal ini dapat mengganggu tingkat keamanan nasional yang mengakibatkan investor enggan untuk melakukan investasi. Data pengangguran dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2: Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 2010-2016

Sumber: BPS Indonesia, 2017

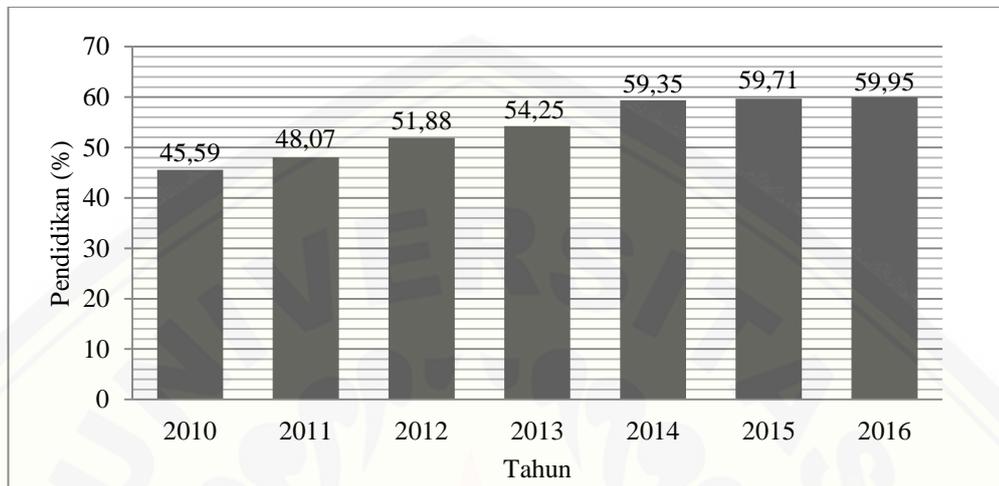
Dilihat dari Gambar 1.2 tingkat pengangguran di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2010-2016. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran mengalami penurunan yaitu dari sebesar 7,28 persen di tahun 2010 turun menjadi 7,22 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi sebesar 6,25 persen dan kembali turun di tahun 2013 menjadi sebesar 6,03 persen. Tahun 2014 tingkat pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan yaitu sebesar 5,82 persen. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,99 persen dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 5,56 persen.

Menurut para pakar pembangunan ekonomi, salah satu gejala ekonomi di negara berkembang yang lebih mengutamakan padat modal adalah terjadinya peningkatan pengangguran. Masalah pengangguran pada umumnya adalah ciri khas dari angkatan kerja di daerah perkotaan. Pengangguran banyak dicirikan oleh perempuan, berusia muda, berpendidikan relatif tinggi dan baru pertama kali mencari kerja.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran. Teori *human capital* bahwa semakin tinggi pendidikan maka akan meningkatkan jumlah penghasilan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan agar SDM yang ada mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat ketinggalan dan keterbelakangan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan produktivitas. Pendidikan menjadi salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi yang bertujuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2003: 404).

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Setiap negara yang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapus

kebodohan. Kebodohan identik dengan pengangguran, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan bekerja sehingga akan menekan jumlah pengangguran (Kamaludin, 1999: 59).



Gambar 1.3: Pendidikan di Indonesia tahun 2010-2016

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan Gambar 1.3 pendidikan di Indonesia dari tahun 2010-2016 menunjukkan angka positif, artinya pendidikan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 pendidikan meningkat dari sebesar 45,59 persen ditahun 2010 naik menjadi 48,07 persen ditahun 2011. Tahun 2012 pendidikan kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,88 persen. Tahun 2013 pendidikan kembali meningkat yaitu sebesar 54,25 persen. Pada tahun 2015 pendidikan terus meningkat yaitu sebesar 59,71 persen dan tahun 2016 pendidikan mengalami peningkatan yaitu sebesar 59,95 persen.

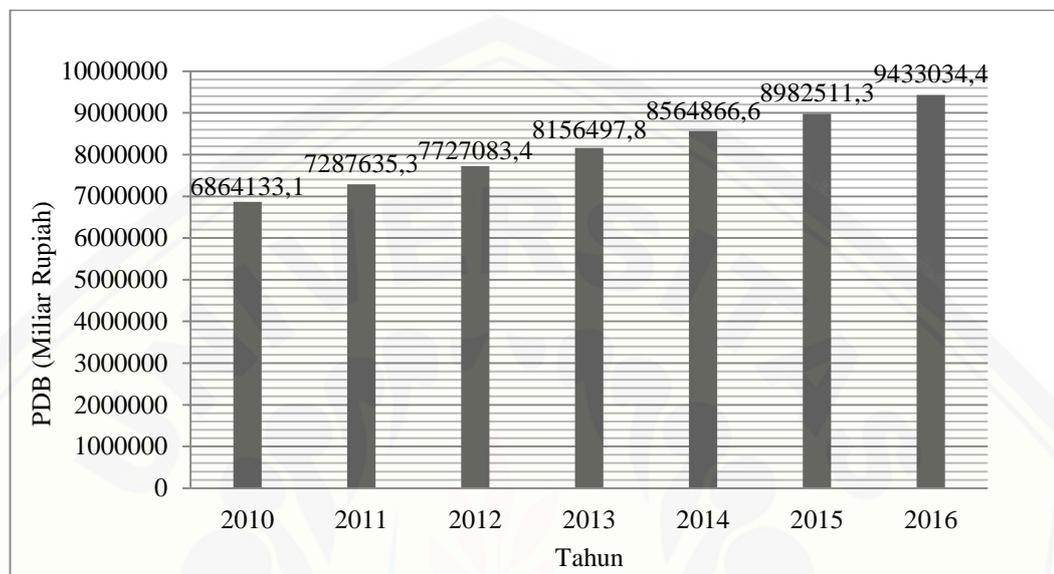
PDRB merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai tingkat kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode (Roby, 2011: 5). Pada kenyataan PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan 2010 di Indonesia tahun 2010-2016 (dalam Miliar Rupiah)

No	Provinsi	Tahun							Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Aceh	101545,24	104874,21	108914,9	1117551,83	113490,36	112661,04	116386,73	109946,9
2	Sumatera Utara	331085,24	353147,59	375924,14	398727,14	419573,31	440955,85	463775,46	397598,39
3	Sumatera Barat	105017,74	111679,49	118724,42	125940,63	133340,84	140704,88	148110,75	126216,96
4	Riau	388578,23	410215,84	425626	436187,51	447986,78	448991,96	458998,09	430940,63
5	Jambi	90618,41	97740,87	104615,08	111766,13	119991,44	125036,4	130499,63	111466,85
6	Sumatera Selatan	194012,97	206360,7	220459,2	232175,05	243297,77	254044,88	266815,41	231023,71
7	Bengkulu	28352,57	30295,05	32363,04	34326,37	36207,15	38066,01	40082,87	34241,87
8	Lampung	150560,84	160437,5	170769,21	180620,01	189797,49	199536,1	209807,19	180218,33
9	Kep. Bangka Belitung	35561,9	38013,99	40104,91	42190,86	44159,44	45961,46	47852,69	41977,89
10	Kep. Riau	111223,67	118961,42	128034,97	137263,85	146325,23	155112,88	162922,5	137120,65
11	Dki Jakarta	1075183,48	1147558,23	1222527,92	1296694,57	1373389,13	1454345,82	1539376,65	1301296,54
12	Jawa Barat	906685,76	965622,06	1028409,74	1093543,55	1149216,06	1207083,41	1275546,48	1089443,85
13	Jawa Tengah	623224,62	656268,13	691343,12	726655,12	764959,15	806775,36	849383,56	731229,87
14	DI Yogyakarta	64678,97	68049,87	71702,45	75627,45	79536,08	83474,44	87687,93	75822,46
15	Jawa Timur	990648,84	1054401,77	1124464,64	1192789,8	1262684,5	1331394,99	1405236,11	1194517,23
16	Banten	271465,28	290545,84	310385,59	331099,11	349351,23	368216,55	387595,37	329808,42
17	Bali	93749,35	99991,63	106951,46	114103,58	121787,57	129130,59	137192,52	114700,96
18	Nusa Tenggara Barat	70122,73	67379,14	66340,81	69766,71	73372,96	89344,58	94548,21	75839,31
19	Nusa Tenggara Timur	43846,61	46334,13	48863,19	51505,19	54107,97	56831,92	59775,7	51609,24
20	Kalimantan Barat	80665,85	90797,59	96161,93	101980,34	107114,96	112324,86	118184,63	101804,31
21	Kalimantan Tengah	56531,02	60492,93	64649,17	6941,99	73724,52	78890,97	83909,49	69658,44
22	Kalimantan Selatan	85305	91252,13	96697,84	101850,54	106779,4	110867,88	115727,55	101211,48
23	Kalimantan Timur	41821,58	445264,42	469646,25	438532,91	446029,05	440647,7	438977,04	442472,71
24	Sulawesi Utara	51721,33	54910,9	58677,59	62422,5	66360,76	70425,14	74771,07	62755,61
25	Sulawesi Tengah	51752,07	56833,83	62249,53	68219,32	71677,53	82803,2	91070,55	69229,43
26	Sulawesi Selatan	17174,74	185708,47	202184,59	217589,13	233988,05	250758,28	269338,55	218758,26
27	Sulawesi Tenggara	48401,15	53546,69	59785,4	64268,71	68291,78	72991,33	77739,55	63574,94
28	Gorontalo	15475,74	16669,09	17987,07	19367,57	20775,8	22068,59	23507,15	19407,29
29	Sulawesi Barat	17183,83	19027,5	20786,89	22227,39	24195,65	25983,65	27550,26	22422,17
30	Maluku	18428,58	19597,39	21000,08	22100,94	23567,73	24859,06	26291,19	22263,57
31	Maluku Utara	14983,91	16002,45	17120,07	18208,74	19208,76	20381,03	21556,32	18208,75
32	Papua Barat	41361,67	42867,19	44423,34	47694,23	50259,91	52346,49	54711,28	47666,3
33	Papua	110808,18	106066,72	107890,94	117118,82	121391,23	130459,91	142476,35	119458,88
	Indonesia	6864133,1	7287635,3	7727083,4	8156497,8	8564866,6	8982511,3	9433034,4	8145108,84

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB di 33 Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016, dimana PDRB terendah diduduki Provinsi Maluku Utara sedangkan PDRB tertinggi diduduki Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1.4: PDB harga konstan 2010 di Indonesia tahun 2010-2016

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan Gambar 1.4 PDB tahun 2010-2016 cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2010 angka PDB sebesar Rp6.864.133,1 miliar dan tahun 2011 PDB meningkat yaitu sebesar Rp7.287.635,3 miliar. Tahun 2013 PDB mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar Rp7.727.083,4 miliar. Tahun 2014 PDB mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp8.564.866,6 miliar. Pada tahun 2015 dan 2016 PDB terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp8.982.511,3 miliar dan tahun 2016 PDB sebesar Rp9.433.034,4 miliar.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan jalan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi juga memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Dana yang dibutuhkan untuk menambah modal disebut investasi.

Tabel 1.2 Realisasi PMA di Indonesia tahun 2010-2016 (dalam Juta US\$)

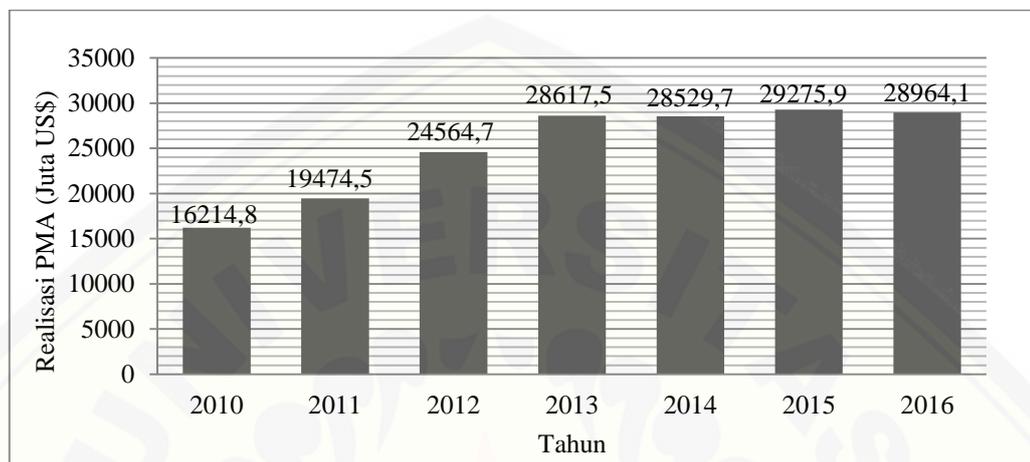
No	Provinsi	Tahun							Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Aceh	4,6	22,5	172,3	94,2	31,1	21,2	134,5	68,6
2	Sumatera Utara	181	753,7	645,3	887,5	550,8	1246,1	1014,7	754,2
3	Sumatera Barat	7,9	22,9	75	91,4	112,1	57,1	79,3	63,7
4	Riau	86,6	212,3	1152,9	1304,9	1369,5	653,4	869,1	806,9
5	Jambi	37,2	19,5	156,3	34,3	51,4	107,7	61	66,8
6	Sumatera Selatan	186,3	557,3	786,4	485,9	1056,5	645,8	2793,5	930,2
7	Bengkulu	25,1	43,1	30,4	22,3	19,3	20,6	55,7	30,9
8	Lampung	30,7	79,5	114,3	46,8	156,5	257,7	85,7	110,1
9	Kep. Bangka Belitung	22	146	59,2	112,4	105	82,7	52,7	82,9
10	Kep. Riau	165,7	219,7	537,1	315,7	392,1	640,4	519,1	398,5
11	Dki Jakarta	6429,3	4824,1	4107,7	2591,1	4509,4	3619,4	3398,2	4211,3
12	Jawa Barat	1692	3839,4	4210,7	7124,9	6562	5738,7	5470,9	4948,3
13	Jawa Tengah	59,1	175	241,5	464	463,3	850,4	1030,8	469,1
14	Di Yogyakarta	4,9	2,4	84,9	29,6	64,9	89,1	19,6	42,2
15	Jawa Timur	1769,2	1312	2298,8	3396,3	1802,5	2593,4	1941	2159,02
16	Banten	1544,2	2171,7	2716,3	3720,2	2034,6	2542	2912,1	2520,2
17	Bali	278,3	482,1	482	390,9	427,1	495,8	450,6	429,5
18	Nusa Tenggara Barat	220,5	465,1	635,8	488,2	551,1	699,4	439	499,9
19	Nusa Tenggara Timur	3,8	5,5	8,7	9,9	15,1	69,9	58,2	24,4
20	Kalimantan Barat	170,4	500,7	397,5	650	966,1	1335,7	630,7	664,4
21	Kalimantan Tengah	546,6	543,7	524,7	481,6	951	933,6	408,2	627,05
22	Kalimantan Selatan	202,2	272,1	272,3	260,6	502,5	961,2	249,4	388,6
23	Kalimantan Timur	1092,2	602,4	2014,1	1335,4	2145,7	2381,4	1139,6	1530,1
24	Sulawesi Utara	226,8	220,2	46,7	65,7	98,4	88	382,8	161,2
25	Sulawesi Tengah	138,5	370,4	806,5	855	1494,2	1085,2	1600,3	907,2
26	Sulawesi Selatan	441,8	89,6	582,6	462,8	280,9	233,3	372,5	351,9
27	Sulawesi Tenggara	14	17	35,7	86,4	161,8	145	376,1	119,4
28	Gorontalo	0,8	12,5	35,3	25,7	4,1	6,9	12,7	14
29	Sulawesi Barat	37,3	5,6	0,2	2,5	16,3	2	20,6	12,07
30	Maluku	2,9	11,7	8,5	53,8	13,1	82,4	102,6	39,3
31	Maluku Utara	246	129,8	90,3	268,5	98,7	203,8	438,9	210,9
32	Papua Barat	17,2	33,1	32	54,2	153,4	258,6	514,5	151,9
33	Papua	329,6	1312	1202,4	2360	1260,6	897	1168,4	1218,6
	Indonesia	16214,8	19474,5	24564,7	28617,5	28529,7	29275,9	28964,1	25091,6

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat realisasi PMA tahun 2010-2016 di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif. Dimana realisasi PMA tahun 2010-2016 terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur dan PMA tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dengan kenaikan PMA di Provinsi Jawa barat yang paling

melonjak yaitu pada tahun 2012 ke 2013 yaitu dari PMA sebesar \$4.210,7 juta menjadi \$7.124,9 juta, terjadi peningkatan sebesar \$2.194,2 juta.

Data realisasi PMA terdapat pada Gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.5: Realisasi PMA di Indonesia tahun 2010-2016

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Dilihat dari Gambar 1.5 realisasi PMA tahun 2010-2016 di Indonesia mengalami naik turun. Pada tahun 2010 PMA yang terealisasi sebesar \$16.214,8 juta dengan PMA terbesar ada pada pada Provinsi DKI Jakarta yang mencapai \$6.429,3 juta. Pada tahun 2011 PMA di Indonesia meningkat menjadi \$19.474,5 juta, dengan PMA tertinggi diduduki oleh provinsi DKI Jakarta kembali yaitu sebesar \$4.824,1 juta. Tahun 2012 PMA di Indonesia meningkat menjadi \$24.564,7 juta, dengan PMA tertinggi diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu sebesar \$4.210,7 juta. Tahun 2013 PMA di Indonesia meningkat menjadi \$28.617,5 juta, dengan PMA tertinggi diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu sebesar \$7.124,9 juta. Tahun 2014 PMA di Indonesia mengalami penurunan \$9.087,8 juta, sehingga pada tahun 2014 PMA di Indonesia sebesar \$28.529,7 juta dengan PMA tertinggi diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu sebesar \$6.562 juta. Tahun 2015 PMA di Indonesia kembali mengalami peningkatan \$746,2 juta, sehingga pada tahun 2015 PMA di Indonesia sebesar \$29.275,9 juta dengan PMA tertinggi diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu sebesar \$5.738,7 juta. Tahun 2016 PMA di Indonesia kembali mengalami penurunan \$311,8 juta, sehingga

pada tahun 2016 PMA di Indonesia sebesar \$28.964,1 juta, dengan PMA diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu sebesar \$5.470,9 juta.

Apabila dilihat dari data PMA dan pengangguran pada tahun 2015, pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan, sedangkan pada PMA di Indonesia tahun 2015 juga mengalami kenaikan. Padahal seharusnya ketika adanya kenaikan investasi maka pengangguran akan semakin berkurang karena perusahaan yang mendapatkan investasi tambahan akan menambah tenaga kerja untuk menghasilkan output yang lebih banyak sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia akan semakin banyak.

Teori Harrod-Domar dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan jumlah barang modal. Meningkatnya barang jumlah barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sebab peningkatan jumlah barang modal akan meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Investasi asing pada umumnya membutuhkan tenaga terlatih sehingga besar kecilnya investasi asing akan mempengaruhi pengangguran.

Tulus Tambunan mengatakan bahwa investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan. Adanya kesempatan kerja yang meningkat maka akan mengurangi tingkat pengangguran, karena pada dasarnya bahwa pengangguran terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja.

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendidikan, PDRB dan Penanaman Modal Asing terhadap Pengangguran di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Pengangguran merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pengangguran di Indonesia masalah yang sangat sulit dipecahkan, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengangguran di 33 provinsi di Indonesia agar diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu didukung dan ditingkatkan guna mengurangi pengangguran. Besarnya pengangguran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pendidikan, PDRB dan penanaman modal asing. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh PMA terhadap pengangguran di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

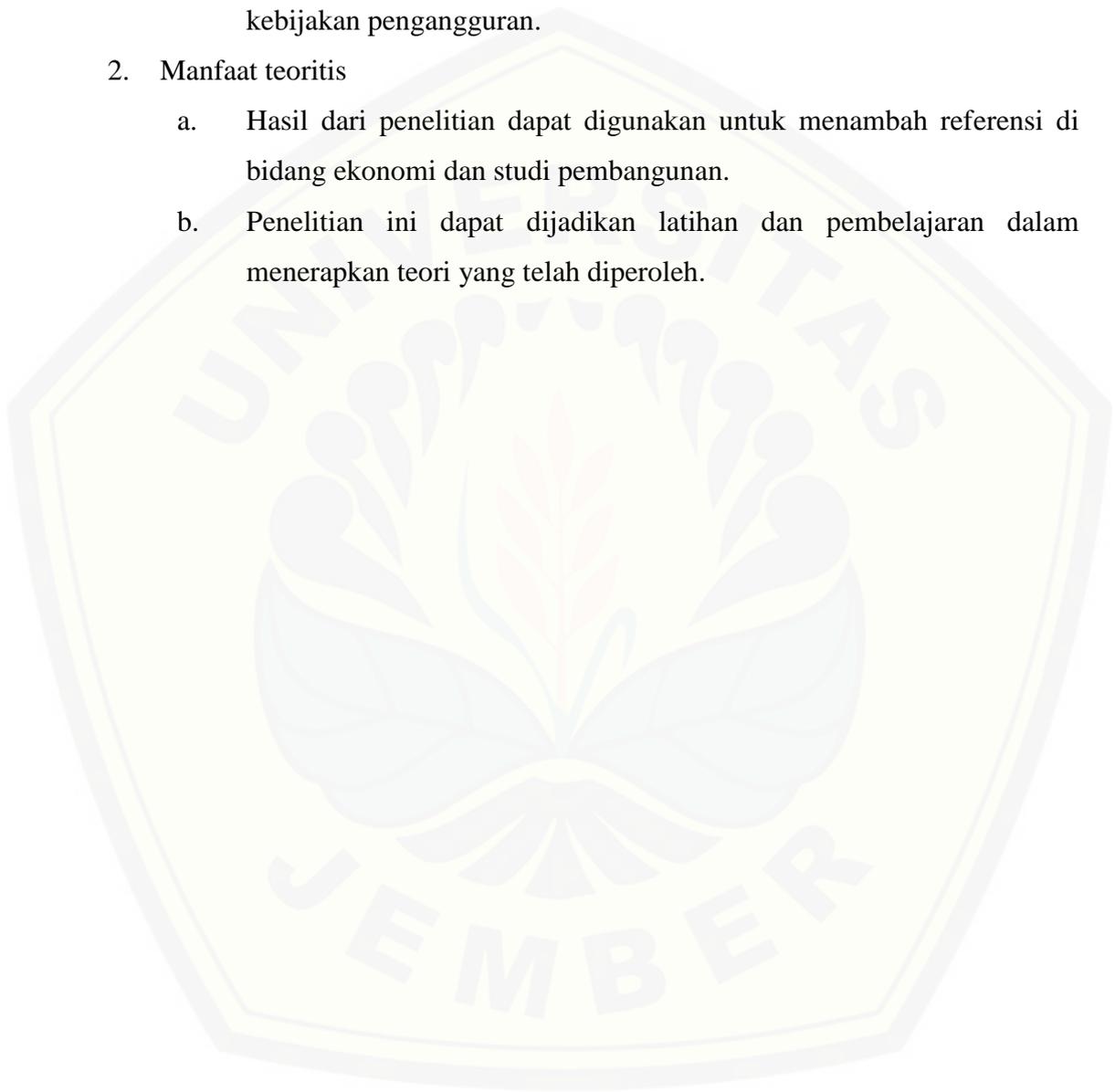
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh PMA terhadap pengangguran di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Dapat tambahan informasi mengenai dampak pendidikan terhadap pengangguran.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terhadap kebijakan pengangguran.
2. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang ekonomi dan studi pembangunan.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang telah diperoleh.



BAB 2. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas beberapa teori yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini antara lain teori pengangguran, teori pendidikan, teori PDRB dan teori investasi.

2.1 Pengangguran

2.1.1 Definisi Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologi yang berakibat pada tindakan kriminalisme. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003: 150).

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara- negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi oleh negara-negara maju (*develop countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001: 253). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2000: 472).

Sedangkan dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan

kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua penduduk yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran merupakan presentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan (Rahardja, 2008: 378).

Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pengangguran dapat diamati melalui 2 pendekatan anatar lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labor Force Approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja = Bekerja + Tidak Bekerja

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labor utilization approach*)

Untuk menentukan besar kecilnya tingkat pengangguran yang didasarkan pada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja antara lain :

1. Bekerja penuh (*Employed*) yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
2. Setengah menganggur (*underemployed*) yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam (Munir, 2006: 198).
3. Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka (*open employment*).

2.1.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Case and Fair (2004: 54) dalam bukunya Prinsip- prinsip Ekonomi Makro, pengangguran dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Istilah itu mengarah pada kecocokan pekerjaan atau

keterampilan jangka pendek. Selain itu pengangguran Friksional juga merupakan jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat- syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan lain.

2. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran ini dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu didalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukanya atau tidak dalam masa bercocok tanam. Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja.

3. Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*)

Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan- perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaanya berarti jam kerja dikurangi, sebageaian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan dan meningkatkan jumlah angka pengangguran.

4. Pengangguran Struktural (*Struktural Unemployment*)

Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan, akan menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibanding pengangguran friksional, hal ini dikarenakan dibutuhkan pendanaan

yang besar dan juga waktu yang lama. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua yang memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang dapat mengurangi dan meningkatkan pengangguran. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rancangan seluruh pendapatan suatu negara dan seluruh pengeluaran untuk pembangunan dalam satu tahun. Sebuah rumah tangga mencapai pendapatan selama satu tahun yang berlangsung dari hasil penjualan jasa atas faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan atas pendapatan yang diterima digunakan untuk membeli barang atau jasa kembali. Hubungan secara tidak langsung dari pemerintah mengenai pendapatan adalah bahwa pemerintah memperoleh pendapatan atau hasil melalui program pemerintah diantaranya pajak. Hasil pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan pendapatan atau mengeluarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana masyarakat.

Menurut Setiawan (2005) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Selain itu, penerimaan dan belanja negara dapat mengurangi tingkat pengangguran bila pendapatan pemerintah besar, pendapatan tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya-biaya pembangunan seperti jalan raya, rumah sakit, jembatan dan sebagainya, sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan proyek tersebut.

2. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Menurut Alghofari (2010), bahwa pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari kenaikan

jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah.

3. Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat strategis peranya berbeda kedudukannya dari faktor-faktor produksi lainnya, karena sumber daya manusia mempunyai kedudukan sebagai subjek dan objek pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi pengangguran, dengan sendirinya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia ini, telah berdampak terhadap kinerja serta kepercayaan para investor untuk menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja sangat menentukan kondisi permintaan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga produktivitas yang rendah akan membuat perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan para tenaga kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini tentunya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Menurut Todaro (2003: 404) yang mempengaruhi produktivitas adalah modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapasitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Menurut Zulhanafi, dkk (Bellante dan Jackson, 2000: 132), produktivitas akan mengalami suatu peningkatan apabila penggunaan terhadap tenaga kerja mengalami peningkatan. Peningkatan penggunaan tenaga kerja akan menurunkan jumlah pengangguran. Begitu sebaliknya, apabila produktivitas mengalami penurunan maka penggunaan terhadap tenaga kerja juga akan mengalami penurunan.

2.1.4 Akibat- Akibat Buruk Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan pada dua aspek (Sukirno, 2000: 514), dimana dua aspek tersebut yaitu :

1. Akibat buruk atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat- akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.
- c. Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah akan berakibat pada pengurangan pada keinginan untuk melakukan investasi.

2. Akibat buruk atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

- a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
- b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut tetap digunakan dalam praktek.
- c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

2.2 Pendidikan

Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is matter of education* (Suparlan Suhartono, 2008). Keberadaan kegiatan mendidik tidak hanya menembus dimensi waktu akan tetapi juga menembus dimensi tempat. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan dapat dikatakan bersifat fundamental, universal, dan fenomenal.

Fundamentalitas pendidikan ini dapat ditentukan dari kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas bagi suatu bangsa. Tanpa melalaui pendidikan seorang anak diyakini tidak akan menjadi sosok manusia utuh (*a fully functioning person*). Universalitas pendidikan dapat dilihat dari proses hiruk pikuk pendidikan yang telah dilakukan umat manusia dalam dimensi waktu maupun tempat. Pada waktu kapanpun dan di manapun pendidikan selalu saja diselenggarakan.

Praktek pendidikan diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi kemajuan pada semua kelompok masyarakat. Pendidikan diharapkan bisa menjadikan individu dan kelompok mesyarakat sebagai warga negara (*member of the nation-state*) yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya disatu sisi, serta dapat mempersiapkan individu dan kelompok masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja disisi yang lain (Achmad Dardiri, 2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah menyebutkan bahwa pendidikan diarahkan untuk mengembangkan segenap potensi yang ada pada diri peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

John Dewey, mengartikan pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental baik secara intelektual maupun emosional kearah alam dan sesama manusia. Jean Jaques Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha memberi bekal yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi dibutuhkannya pada masa dewasa. G. Terry Page, J.B. Thomas, dan

A.R. Marshall, pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cekap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

1. Pendidikan formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Jenjang pendidikan formal:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

2. Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau perlengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

3. Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan perana sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Analisis tentang investasi dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang dapat meningkat produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004: 209).

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.3.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004: 8) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Menurut departemen statistik ekonomi dan moneter (Bank Indonesia, 2004: 85), PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga yang berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Rahardjo Adisasmita (2011) berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2.3.2 Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, perhotelan dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor netto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (ekspor dikurangi impor).

2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

2.4.1 Definisi Penanaman Modal Asing

Menurut Widjaya (2000) Penanaman Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia dan alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara.

Menurut UU no. 1 tahun 1967 dan UU no. 11 tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Sedangkan penanaman modal asing menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomer 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Peranan Penanaman Modal Asing dalam pembangunan adalah :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dari pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan.

3. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana.

Untuk Penanaman Modal Asing dari segi ekonomi dianjurkan berada dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pemilik modal asing mau menginvestasikan modalnya pada proyek-proyek besar.

2. Pemerintah dalam menerima kredit PMA harus benar-benar menggunakan kredit untuk proyek-proyek yang bisa membangun tabungan dan capital lebih lanjut.

Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung (Jhingan, 2004: 483).

1. Penanaman Modal Asing Langsung

Penanaman Modal Asing Langsung merupakan perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi.

Penanaman modal asing langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dalam mana pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.

2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung

Penanaman Modal Asing tidak langsung lebih dikenal sebagai investasi portofolio atau *rentier* yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja. Pada tahun-tahun terakhir ini telah berkembang investasi tidak

langsung secara multilateral. Warga negara dari suatu negara membeli surat-surat obligasi *Internasional Bank for Recontruction and Development* (IBRD), yang dilambangkan atau yang membiayai suatu proyek khusus di beberapa negara terbelakang.

Penanaman modal asing menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia, PMA diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia. Sejalan dengan perubahan keadaan sosial, politik dan ekonomi, diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional.

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Hubungan Pendidikan (X_1) dan Pengangguran (Y)

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*Sustainable Development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Rustian Kamaludin (1999: 59) mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan bekerja sehingga akan menekan jumlah pengangguran.

2.5.2 Hubungan PDRB (X_2) dan Pengangguran (Y)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan maupun penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena GDP merupakan indikator yang berhubungan dengan pengangguran. Secara teori setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut Hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya GDP suatu Negara. Setiap penurunan 2 persen GDP, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan asosiasi antara pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran (Samuelson and Nordhaus, 2004: 365-366). Kurva Hukum Okun dapat dilihat Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1: Kurva Hukum Okun

Sumber : Teori Makro Ekonomi, (Mankiw 2000: 432)

2.5.3 Hubungan PMA (X_3) dan Pengangguran (Y)

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2000), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investor asing untuk berinvestasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Mohamad Rifqi Muslim	Pengangguran Terbuka dan Determinannya	1. Tingkat pengangguran terbuka (Y) 2. Laju pertumbuhan ekonomi (X1) 3. Angkatan kerja (X2) 4. Pendidikan (X3) 5. Pengeluaran pemerintah (X4)	GLS (Data Panel)	1. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten dan kota DI Yogyakarta 2. Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan 3. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan 4. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan
2	Roby Cahyadi Kurniawan (2013)	Analisis Pengaruh PDRB, UMK dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011	1. Pengangguran terbuka (Y) 2. PDRB (X1) 3. UMK (X2) 4. Inflasi (X3) 5. Investasi (X4) 6. Tingkat bunga (X5) 7. Jumlah industri (X6)	Regresi Linear Berganda (Time Series)	1. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kota Malang 2. UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kota Malang 3. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kota Malang 4. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kota Malang 5. Tingkat bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kota Malang 6. Jumlah industri

					berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kota Malang
3	Mega Triana Putri, Kasman Karimi ¹ , Firdausy ²	Analisis Pengaruh Lulusan Pendidikan Perguruan Tinggi, UMP dan Investasi terhadap Pengangguran di Kota Padang	1. Pengangguran (Y) 2. Pendidikan (X1) 3. UMP (X2) 4. Investasi (X3)	Analisis Regresi Berganda (Time Series)	1. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Padang 2. UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Padang 3. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan
4	Noorfath Hasanah, Harlren, Hainim Kadir	Pengaruh Migrasi Masuk dan Investasi terhadap Pengangguran di Kota Pekanbaru tahun 2002-2011	1. Pengangguran (Y) 2. Migrasi masuk (X1) 3. Investasi (X2)	Analisis Regresi Linear Berganda (Time Series)	1. Migrasi masuk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Pekanbaru tahun 2002-2011 2. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Pekanbaru tahun 2002-2011
5	Desi Ajeng Rahayu	Pengaruh Tingkat Pendidikan, UMP dan PMA terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera	1. Pengangguran terdidik (Y) 2. Tingkat pendidikan (X1) 3. UMP (X2) 4. PMA (X3)	Analisis Regresi Data Panel (Data Panel)	1. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera 2. UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera 3. PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Pulau Sumatera

2.6 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor tersier ke sektor sekunder (PDRB, 2016: 3). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor internal atau dari ekonomi sendiri yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi adalah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor non ekonomi merupakan faktor dari luar ekonomi yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi adalah pendidikan.

Investasi merupakan faktor ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi. Investasi di bagi menjadi dua yaitu investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dan investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Menurut Widjaya (2000) Penanaman Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia dan alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara.

Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat dalam teori pertumbuhan Harrod-Dommar. Harrod-Domar dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan jumlah barang modal. Meningkatnya jumlah barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap

perekonomian, sebab peningkatan jumlah barang modal akan meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran.

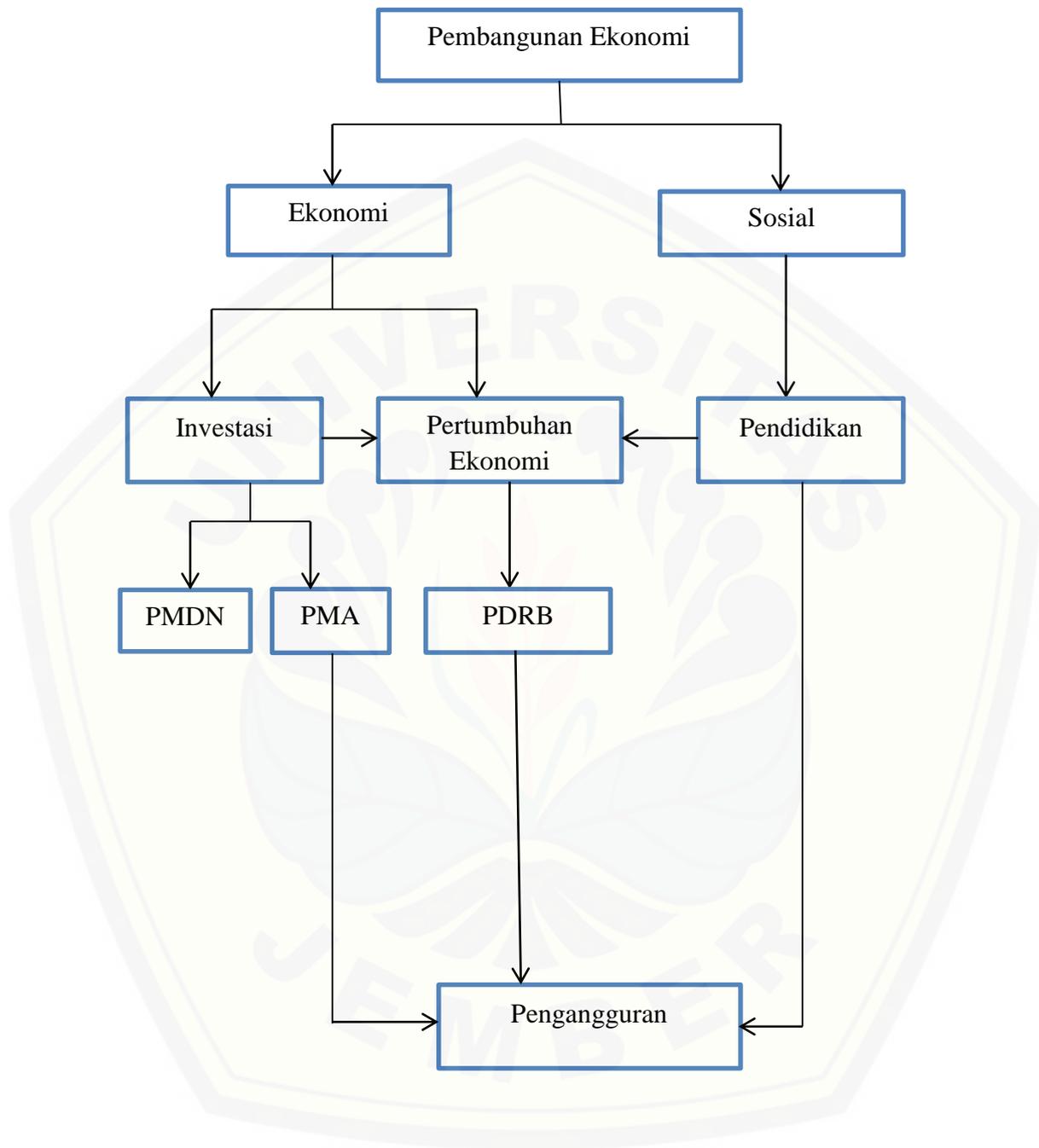
Hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam teori ekonomi menurut Dornbusch dan Fischer (1997) menyatakan bahwa investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya berimplikasi terhadap kesempatan kerja disuatu wilayah. Investasi asing (PMA) atau investasi domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Adanya investasi asing akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan akan bertambah sehingga dalam jaringan yang luas akan menambah pendapatan nasional (Syah, 2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dapat dilihat dalam Teori Hukum Okun (*Okun's Law*). Dalam teori Hukum Okun menyatakan bahwa adanya hubungan negatif yang linear antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi: kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen akan menurunkan pengangguran sebesar 1 persen. Artinya semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tersebut lebih berorientasi pada padat karya sehingga memberikan peluang kerja baru ataupun kesempatan kerja, yang berarti proses produksi lebih menggunakan tenaga kerja manusia dari pada tenaga mesin atau teknologi canggih.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Ketika ekonomi tumbuh, maka terdapat pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ketika hal ini terjadi maka kebutuhan akan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa pun akan ikut tumbuh sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Dari segi non ekonomi pendidikan menjadi pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Kamaludin (1999: 59) mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan bekerja sehingga akan menekan jumlah pengangguran. Artinya apabila pendidikan masyarakat tinggi akan mempermudah dalam mencari pekerjaan, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.





Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara dan harus diuji kebenarannya dengan data yang dianalisa dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan uraian teori tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendidikan (X_1) berpengaruh negatif terhadap pengangguran, bahwa semakin meningkatnya pendidikan maka pengangguran akan menurun.
2. PDRB (X_2) berpengaruh negatif terhadap pengangguran, artinya bahwa semakin meningkatnya PDRB maka pengangguran akan menurun.
3. PMA (X_3) berpengaruh negatif terhadap pengangguran, bahwa semakin meningkatnya PMA maka pengangguran akan menurun.

BAB 3. Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data dan jenis data, unit analisis dan metode untuk menganalisis dan juga terdapat uji statistik dan ujia asumsi klasik. Kemudian bab ini juga menjelaskan definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif *eksplanatory*. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian terhadap suatu permasalahan berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang dijelaskan secara sistematis dan pada umumnya berkaitan dengan opini dari individu, kelompok, maupun organisasi (Daryanto dan Yundy, 2005: 13).

Sedangkan penelitian *eksplanatory* bertujuan untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih fenomena atau fakta (Sugiyono, 2012: 7). Menurut Daryanto dan Yundi (2005: 15) penelitian *eksplanatory* adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hepotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hepotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Menurut Umar (1999: 36) penelitian *eksplanatory* adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu penelitian 2010 – 2016. Provinsi-provinsi tersebut yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2010-2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 33 data provinsi di Indonesia yang menghasilkan 231 observasi. Pemilihan periode ini disebabkan karena pengangguran mengalami fluktuasi dan terjadinya peningkatan PDRB dan diikuti dengan peningkatan investasi di tahun 2011, sehingga penelitian pada periode tersebut menarik untuk diamati serta data tersedia pada tahun tersebut.

Data sekunder yaitu data yang bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainya (Marzuki, 2005: 55). Periode data yang digunakan adalah data tahun 2010-2016 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Data yang diperlukan adalah :

1. Data pengangguran untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.
2. Data pendidikan yang diproduksi dengan angka partisipasi murni untuk masing-masing provinsi di Indonesia.
3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 untuk masing-masing provinsi di Indonesia.
4. Data realisasi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) untuk masing-masing provinsi di Indonesia.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2009: 248). Menurut Zulganef (2008: 41) unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah 32 Provinsi yang ada di Indonesia periode 2010-2016.

1.5 Metode Analisis

3.5.1 Metode Analisis Data Panel

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 9. Analisis menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series*) dan kerat lintang (*cross-section*). Gujarati (2003: 637) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana T adalah banyaknya data *time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

$N \times T$: banyaknya data panel

Menurut Hsiao, 1986 (dikutip dari Firmansyah, 2009) keunggulan penggunaan data panel dibanding *time series* dan *cross section* adalah:

1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabel yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, yang dapat menghasilkan ekonometris yang efisien.

2. Panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* dan *time series* saja.
3. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

3.5.2 Permodelan Data Panel

Menurut Nachrowi dan Usman (2006: 311) secara umum terdapat 3 model panel yang sering digunakan yaitu:

1. *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan menggunakan kuadran terkecil biasa yang ditetapkan dalam data berbentuk pool, sering disebut pula dengan *Pooled Least Square*. Model ini mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intercept dari masing-masing variabel adalah sama dan slope koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross section*.

Kelemahan *Pooled Least Square* yaitu adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Dimana kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek tersebut pada waktu yang lain (Winarno, 2007:9.14).

2. *Fixed-Effect Model* (FEM)

Fixed-Effect Model atau metode efek tetap ini dapat menunjukkan perbedaan antara objek meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Efek tetap ini dimaksudkan adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Keunggulan metode efek tetap ini adalah dapat membedakan efek waktu dan tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas yang mungkin sulit dipenuhi. Kelemahan model efek tetap ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan objek tersebut pada waktu yang lain.

3. *Random Effect Model*

Keputusan untuk memasukkan variabel dummy dalam efek tetap (*fixed effect*) tidak dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel dummy ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang didalamnya melibatkan korelasi antara error term karena berubahnya waktu yang disebabkan berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Efek random (*random effect*) digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap (*fixed effect*) yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun untuk menganalisis dengan metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien (Winarno, 2007 : 9-17).

3.5.3 Pemilihan Model Data Panel

Dalam pemilihan model data panel perlu melakukan dua tahap, yaitu dengan Uji Chow dan Uji Hausman.

1. Uji Chow Test

Uji Chow Test yakni pengujian untuk menentukan model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Relatif terhadap *Fixed Effect Model*, *Pooled Least Square* adalah *restrictal model* dimana menerapkan intercept yang sama untuk seluruh individu. Padahal asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap unit tersebut memiliki perilaku yang berbeda. Untuk mengujinya dapat digunakan restricted F-test, dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model PLS (*Restricted*)

H_1 : Model FEM (*Unrestricted*)

$$\text{Chow} = \frac{(\text{RRS} - \text{URSS}) / (\text{N} - 1)}{(\text{URSS} / (\text{NT} - \text{N} - \text{K}))}$$

Dimana:

RRS : *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square/common intercept*).

URSS : *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

N : Jumlah data *cross section*

T : Jumlah data *time series*

K : Jumlah variabel independen

Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik yaitu nilai F-test atau Chow Statistik (F-statistik) apabila hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Dasar penolakan terhadap hipotesis adalah dengan membandingkan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F-hitung lebih besar dari F-tabel maka H_0 ditolak berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari sama dengan F-tabel maka H_0 diterima berarti model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.

2. Uji Hausman Test

Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat, maka langkah selanjutnya adalah menguji model mana antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat. Uji ini disebut juga Uji Hausman. Ada beberapa pertimbangan teknis empiris yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yaitu :

1. Bila T (jumlah unit *time series*) besar sedangkan N (jumlah unit *cross section*) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal ini pilihan umumnya didasarkan pada kemudahan perhitungan yaitu FEM.

2. Bila N besar atau T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda signifikan. Jadi, apabila kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) maka REM harus digunakan, begitu juga sebaliknya.
3. Apabila *cross section component* (ε_i) berkorelasi dengan variabel bebas X maka parameter bebas yang diperoleh dengan REM akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias.
4. Apabila N dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi, maka REM lebih efisien dibandingkan tidak bias.

Keputusan penggunaan REM dan FEM dapat juga ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan dengan Hausman. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-square* statistik sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari *Hausman Test* dibandingkan dengan *Chi-square* statistik dengan $df=k$, dimana k adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi. Jika hasil dari Hausman test signifikan, maka H_0 ditolak, yang berarti metode analisis FEM yang digunakan.

3.5.4 Model Empiris

Model persamaan ekonometrika yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \beta_3 X_{3i,t+1} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:

Y_{it} : pengangguran di daerah i dengan periode t (%)

X_{1it} : pendidikan di daerah i dengan periode t (%)

X_{2it} : *Produk Domestik Regional Bruto* di daerah i dengan periode t (Miliar)

X_{3it+1} : Penanaman modal asing di daerah i dengan periode t+1 (Miliar)

$\varepsilon_{i,t}$: *error term*

β_0 : koefisien regresi (konstan)

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.6 Uji Statistik

Uji ini digunakan untuk menguji apakah koefesiaen regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata). Signifikan yang dimaksud adalah suatu nilai koefisien slope sama dengan nol. Jika koefisien slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Ada dua jenis hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan antara lain:

3.6.1 Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara simultan atau bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus (Gujarati, 2003: 257):

$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/n - k}$$

Dimana:

R^2 : Koefidien determinasi majemuk

$k-1$: Derajat bebas pembilang

$n-k$: Derajat bebas penyebut

k : Banyak parameter total yang diperlukan

n : Jumlah sampel

Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau ada pengaruh signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Begitu pula sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari sama dengan F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Adapun cara lain yang dapat digunakan adalah setelah melakukan regresi kemudian akan diperoleh probabilitas F-statistik, yang selanjutnya nilai probabilitas F-hitung dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Jika probabilitas F-statistik lebih kecil dari sama dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Begitu pula sebaliknya, jika probabilitas F-statistik lebih kecil dari sama dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung terhadap t-tabel (Ghozali, 2011: 98). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan rumus (Gujarati: 2003: 129-133):

$$t - \text{hitung} = \frac{\text{Koefisien regresi } b_i}{\text{Se } b_i}$$

Dimana:

1. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H_0 diterima dan menolak H_a atau dengan kata lain ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika t-hitung lebih kecil dari sama dengan t-tabel, maka H_0 diterima dan menolak H_a atau tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun cara lain yang dapat digunakan adalah setelah dilakukan regresi kemudian membandingkan probabilitas (t-hitung) masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Jika probabilitas t-hitung $\leq \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, dengan kata lain ada pengaruh variabel independen terhadap variabel independen dan sebaliknya. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H_0 diterima, dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) berguna untuk mengukur besarnya variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana bila semakin tinggi nilai R^2 , suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependen. Beberapa kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi.
2. Mengukur proporsi varian Y yang diterangkan oleh pengaruh linear dari variabel independen.

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Merupakan uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai *residual* dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test*. Pedoman J-B test adalah:

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X_2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB hitung \leq nilai X_2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung $>$ nilai ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah terdistribusi normal.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang pertama adalah adanya multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya antar variabel

independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1).

Apabila nilai matrik kolerasi melebihi 80% maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinearitas (Gujarati, 2015: 409). Ada beberapa dampak terjadinya multikolinearitas, yaitu:

1. Estimator masih bersifat *Blue* karena nilai varian dan kovarian besar.
2. Nilai hitung t-statistik variabel independen ada yang tidak signifikan karena interval estimasi cenderung lebih besar sehingga terdapat kesalahan pengujian hipotesis.
3. Nilai koefisien determinasi R^2 cenderung mempunyai nilai besar namun banyak variabel independen yang tidak signifikan.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas artinya varian variabel dalam model tidak sama (konstan) konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan oleh variannya yang tidak minimum (tidak efisien) (Algifari, 2009: 85).

Heteroskedastisitas cenderung terjadi pada model yang menggunakan data *cross section* dari pada data *time series*. Hal ini terjadi karena data *time series* berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan stabil. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi dan Uji White. Penelitian ini menggunakan Uji *White Heteroscedasticity*, dimana apabila nilai probabilitas chi-square lebih besar dari pada 5 persen maka H_0 diterima tidak terjadi Heteroskedastisitas yang artinya model tersebut bersifat homoskedastis (Gujarati, 2015: 463).

3.9 Definisi Variabel Operasional

Defenisi mengenai variabel- variabel penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Dalam penelitian ini data pengangguran menggunakan satuan persen (%). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dan *cross section* yang diperoleh dari BPS Indonesia.
2. Pendidikan dalam penelitian ini menggunakan proksi Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Dalam penelitian ini variabel menggunakan satuan persen (%). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *time series* dan *cross section* yang berasal dari BPS Indoensia.
3. PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Variabel ini menggunakan satuan miliar rupiah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *time series* dan *cross section* yang berasal dari BPS Indonesia
4. Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dalam penelitian ini variabel menggunakan satuan juta US\$. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *time series* dan *cross section* yang berasal dari BPS Indonesia.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2010-2016. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya pendidikan maka pengangguran akan menurun.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2010-2016. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB maka pengangguran akan semakin berkurang.
3. Penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2010-2016. Berpengaruh negatif artinya semakin tinggi PMA maka pengangguran akan berkurang. Penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia hal ini dikarenakan adanya kesenjangan realisasi PMA yang tinggi terjadi antar provinsi di Indonesia.

5.2 Saran

Dari kesimpulan terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara pendidikan dengan pengangguran di Indonesia, diharapkan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan yaitu dengan memberikan pendidikan gratis sampai kejenjang SMA.
2. Adanya pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan pengangguran di Indonesia, diharapkan bagi pemerintah untuk memperhatikan kebijakan ekonomi makro yang berkaitan dengan PDRB, yaitu meningkatkan PDRB dengan cara meningkatkan investasi dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
3. Pemerintah diharapkan dapat menarik minat investor asing dengan cara menciptakan iklim yang kondusif, penyerderhanaan proses perjanjian dan

memperbaiki sarana maupun prasarana infrastruktur sehingga diharapkan nilai investasi asing (PMA) dapat meningkat dan dapat mengurangi jumlah pengangguran.

4. Bagi pendidikan tinggi harus merubah *mindset* dari mencari pekerjaan menjadi pembuat lapangan pekerjaan (*job creator*). Karena dengan seseorang menjadi *job creator*, maka mereka akan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu orang lain yang belum memiliki pekerjaan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.
5. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas baru lainnya yang dapat mempengaruhi pengangguran dengan periode waktu yang lebih panjang sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSATAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustina, Mustika Candra Dewi. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Agatha, Martia. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengangguran di Kota Semarang*. Skripsi. Undip.
- Alghofari, Farid. 2006. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Pengangguran*. Vol. 01, No. 1.
- Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Semarang. Undip.
- Algifari. 2009. *Analisis Statistik untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Arka, Ni Putu Sucitrawati Sudarsana. 2012. Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Udayana.
- Astuti, Wurdianti Yuli. 2014. Pengangguran Terdidik di Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UNY.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Memahami Data Strategi yang Dihasilkan BPS*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Angka Partisipasi Murni*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Realisasi Penanaman Modal Asing*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran*. Indonesia: Badan Pusat Statistik
- Bellante, Don dan Mark Jackson. 2000. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Edisi Terjemahan Jkarta. FE UI.

- Case, Karl E dan Ray C. Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Edisi Kelima, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Indeks.
- Dardari, Achmad. 2005. *Bahan Kuliah Semester Gasal: Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta. Universitas Yogyakarta.
- Daryanto, Arief dan Yundy Hafizrianda. 2005. *Model-Model Kuantitatif, Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor. IPB.
- Firmansyah. 2009. *Model Regresi Data Panel Aplikasi dengan Eviews 6.0*. Semarang. Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Undip.
- Gilarso. 2002. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, Damodar. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Hajji, Muhammad Shun. 2013. Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Kota Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 2, No 3. Universitas Diponegoro.
- Hsiao. 1986. *Analysis of Panel Data*. Cambridge University Press: New York.
- Husein, Umar. 1999. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jhingan, M.I. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Terjemahan Guritno Rajawali.
- Kamaludin, Rustian. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kembar, Sari Anggun. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Negeri Padang.
- Kuriniawan, Roby Cahyadi. 2011. Analisis Pengaruh PDRB, UMK dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Lipsey, Richard G, dkk. 1991. *Pengantar Makroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. 2006. *Teori Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Marzuki. 2005. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta. Ekonisia.
- Muana, Nanga. 2001. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Rahardja, Pratama. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi Keempat: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rum, Alim Moch. 2007. Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1980-2007.

- Sari, Nur Ravika. 2016. Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 14, No. 01.
- Safitri, Dania Safia. 2011. *Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Samuelsen, Paul A. 2008. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Samuelsen, Paul A dan William D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Simanjuntak, Pyaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Suhartono, Suparlan. 2008. *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta. Ar Ruzz Media.
- Syah, Thomamas Budiman. 2005. *Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 1983-2003*.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widjaya, Rai. 2000. *Merancang Suatu Kontrak. Edisi Revisi*. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.
- Wing, Wahyu Winarno. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Unit Penerbit dan Percetakan Yogyakarta.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulhanafi, dkk. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, vol. 2, No. 3, hal. 85-109.

Lampiran A

Pendidikan SMA di Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam persen)

NO	Provinsi	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	62,42	61,37	61,82	63,43	69,20	69,82	70,00
2	Sumatera Utara	55,72	57,48	60,29	62,19	65,80	66,69	66,85
3	Sumatera Barat	55,06	54,78	55,68	61,00	66,52	66,90	67,12
4	Riau	52,24	53,31	53,06	58,74	62,31	62,60	62,76
5	Jambi	45,31	49,46	46,09	52,13	59,22	59,41	59,52
6	Sumatera Selatan	43,49	45,79	49,34	51,67	57,92	58,27	58,59
7	Bengkulu	49,97	50,78	50,83	60,32	64,61	64,97	65,29
8	Lampung	41,97	46,05	46,14	53,48	57,64	58,39	58,85
9	Kep, Bangka Belitung	38,69	41,92	42,93	50,80	56,93	57,02	57,22
10	Kep, Riau	54,74	56,85	63,53	67,62	70,52	71,23	71,58
11	Dki Jakarta	50,57	49,91	54,25	55,40	58,79	59,04	59,30
12	Jawa Barat	38,84	42,45	51,24	52,25	56,48	56,73	56,92
13	Jawa Tengah	45,00	47,17	51,11	51,81	58,11	58,27	58,49

14	Di Yogyakarta	59,35	59,25	63,54	64,86	68,46	68,60	68,96
15	Jawa Timur	48,60	49,29	52,36	53,30	60,00	60,31	60,76
16	Banten	39,61	46,24	53,00	53,28	56,87	57,04	57,21
17	Bali	57,14	59,48	63,55	67,04	70,83	71,53	71,71
18	Nusa Tenggara Barat	49,35	53,41	53,81	58,00	64,11	64,97	65,19
19	Nusa Tenggara Timur	34,93	40,33	38,19	47,30	52,15	52,51	52,87
20	Kalimantan Barat	36,83	36,86	37,44	44,79	50,06	50,32	50,43
21	Kalimantan Tengah	39,62	44,99	43,55	45,43	51,75	52,36	52,50
22	Kalimantan Selatan	36,24	43,36	49,39	50,05	55,04	55,58	55,91
23	Kalimantan Timur	53,66	55,52	60,34	62,91	67,41	67,78	67,92
24	Sulawesi Utara	50,70	50,15	51,15	57,26	61,69	62,23	62,50
25	Sulawesi Tengah	40,23	48,50	52,25	58,38	63,13	63,32	63,61
26	Sulawesi Selatan	42,75	48,17	54,20	54,26	59,10	59,47	59,62
27	Sulawesi Tenggara	48,54	51,32	50,67	55,50	61,91	62,23	62,63
28	Gorontalo	39,15	44,46	45,47	48,91	56,07	56,24	56,37
29	Sulawesi Barat	34,03	48,41	44,54	52,22	56,65	56,78	57,08
30	Maluku	59,80	52,78	50,20	55,59	62,60	63,07	63,49
31	Maluku Utara	52,68	52,36	56,76	59,54	63,10	63,20	63,47
32	Papua Barat	44,75	48,33	44,98	53,80	62,29	62,40	62,62
33	Papua	36,06	30,82	29,16	36,73	43,11	43,22	43,27
	Indonesia	45,59	48,07	51,88	54,25	59,35	59,71	59,95

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Lampiran B

Data PDRB di Indonesia Tahun 2010-2016 (Miliar Rupiah)

NO	Provinsi	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	101545,24	104874,21	108914,9	111755,83	113490,36	112661,04	116386,73
2	Sumatera Utara	331085,24	353147,59	375924,14	398727,14	419573,31	440955,85	463775,46
3	Sumatera Barat	105017,74	111679,49	118724,42	125940,63	133340,84	140704,88	148110,75
4	Riau	388578,23	410215,84	425626	436187,51	447986,78	448991,96	458998,09
5	Jambi	90618,41	97740,87	104615,08	111766,13	119991,44	125036,4	130499,63

6	Sumatera Selatan	194012,97	206360,7	220459,2	232175,05	243297,77	254044,88	266815,41
7	Bengkulu	28352,57	30295,05	32363,04	34326,37	36207,15	38066,01	40082,87
8	Lampung	150560,84	160437,5	170769,21	180620,01	189797,49	199536,1	209807,19
9	Kep. Bangka Belitung	35561,9	38013,99	40104,91	42190,86	44159,44	45961,46	47852,69
10	Kep. Riau	111223,67	118961,42	128034,97	137263,85	146325,23	155112,88	162922,5
11	Dki Jakarta	1075183,48	1147558,23	1222527,92	1296694,57	1373389,13	1454345,82	1539376,6
12	Jawa Barat	906685,76	965622,06	1028409,74	1093543,55	1149216,06	1207083,41	1275546,4
13	Jawa Tengah	623224,62	656268,13	691343,12	726655,12	764959,15	806775,36	849383,56
14	Di Yogyakarta	64678,97	68049,87	71702,45	75627,45	79536,08	83474,44	87687,93
15	Jawa Timur	990648,84	1054401,77	1124464,64	1192789,8	1262684,5	1331394,99	1405236,1
16	Banten	271465,28	290545,84	310385,59	331099,11	349351,23	368216,55	387595,37
17	Bali	93749,35	99991,63	106951,46	114103,58	121787,57	129130,59	137192,52
18	Nusa Tenggara Barat	70122,73	67379,14	66340,81	69766,71	73372,96	89344,58	94548,21
19	Nusa Tenggara Timur	43846,61	46334,13	48863,19	51505,19	54107,97	56831,92	59775,7
20	Kalimantan Barat	86065,85	90797,59	96161,93	101980,34	107114,96	112324,86	118184,63
21	Kalimantan Tengah	56531,02	60492,93	64649,17	69410,99	73724,52	78890,97	83909,49
22	Kalimantan Selatan	85305	91252,13	96697,84	101850,54	106779,4	110867,88	115727,55
23	Kalimantan Timur	418211,58	445264,42	469646,25	438532,91	446029,05	440647,7	438977,04
24	Sulawesi Utara	51721,33	54910,9	58677,59	62422,5	66360,76	70425,14	74771,07
25	Sulawesi Tengah	51752,07	56833,83	62249,53	68219,32	71677,53	82803,2	91070,55
26	Sulawesi Selatan	171740,74	185708,47	202184,59	217589,13	233988,05	250758,28	269338,55
27	Sulawesi Tenggara	48401,15	53546,69	59785,4	64268,71	68291,78	72991,33	77739,55
28	Gorontalo	15475,74	16669,09	17987,07	19367,57	20775,8	22068,59	23507,15
29	Sulawesi Barat	17183,83	19027,5	20786,89	22227,39	24195,65	25983,65	27550,26
30	Maluku	18428,58	19597,39	21000,08	22100,94	23567,73	24859,06	26291,19
31	Maluku Utara	14983,91	16002,45	17120,07	18208,74	19208,76	20381,03	21556,32
32	Papua Barat	41361,67	42867,19	44423,34	47694,23	50259,91	52346,49	54711,28
33	Papua	110808,18	106066,72	107890,94	117118,82	121391,23	130459,91	142476,35

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Lampiran C

Data Realisasi PMA Tahun 2010-2016 di Indonesia (Juta US\$)

NO	Provinsi	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

1	Aceh	4,6	22,5	172,3	94,2	31,1	21,2	134,5
2	Sumatera Utara	181	753,7	645,3	887,5	550,8	1246,1	1014,7
3	Sumatera Barat	7,9	22,9	75	91,4	112,1	57,1	79,3
4	Riau	86,6	212,3	1152,9	1304,9	1369,5	653,4	869,1
5	Jambi	37,2	19,5	156,3	34,3	51,4	107,7	61
6	Sumatera Selatan	186,3	557,3	786,4	485,9	1056,5	645,8	2793,5
7	Bengkulu	25,1	43,1	30,4	22,3	19,3	20,6	55,7
8	Lampung	30,7	79,5	114,3	46,8	156,5	257,7	85,7
9	Kep.Bangka Belitung	22	146	59,2	112,4	105	82,7	52,7
10	Kep. Riau	165,7	219,7	537,1	315,7	392,1	640,4	519,1
11	Dki Jakarta	6429,3	4824,1	4107,7	2591,1	4509,4	3619,4	3398,2
12	Jawa Barat	1692	3839,4	4210,7	7124,9	6562	5738,7	5470,9
13	Jawa Tengah	59,1	175	241,5	464	463,3	850,4	1030,8
14	Di Yogyakarta	4,9	2,4	84,9	29,6	64,9	89,1	19,6
15	Jawa Timur	1769,2	1312	2298,8	3396,3	1802,5	2593,4	1941
16	Banten	1544,2	2171,7	2716,3	3720,2	2034,6	2542	2912,1
17	Bali	278,3	482,1	482	390,9	427,1	495,8	450,6
18	Nusa Tenggara Barat	220,5	465,1	635,8	488,2	551,1	699,4	439
19	Nusa Tenggara Timur	3,8	5,5	8,7	9,9	15,1	69,9	58,2
20	Kalimantan Barat	170,4	500,7	397,5	650	966,1	1335,7	630,7
21	Kalimantan Tengah	546,6	543,7	524,7	481,6	951	933,6	408,2
22	Kalimantan Selatan	202,2	272,1	272,3	260,6	502,5	961,2	249,4
23	Kalimantan Timur	1092,2	602,4	2014,1	1335,4	2145,7	2381,4	1139,6
24	Sulawesi Utara	226,8	220,2	46,7	65,7	98,4	88	382,8
25	Sulawesi Tengah	138,5	370,4	806,5	855	1494,2	1085,2	1600,3
26	Sulawesi Selatan	441,8	89,6	582,6	462,8	280,9	233,3	372,5
27	Sulawesi Tenggara	14	17	35,7	86,4	161,8	145	376,1
28	Gorontalo	0,8	12,5	35,3	25,7	4,1	6,9	12,7
29	Sulawesi Barat	37,3	5,6	0,2	2,5	16,3	2	20,6
30	Maluku	2,9	11,7	8,5	53,8	13,1	82,4	102,6
31	Maluku Utara	246	129,8	90,3	268,5	98,7	203,8	438,9

32	Papua Barat	17,2	33,1	32	54,2	153,4	258,6	514,5
33	Papua	329,6	1312	1202,4	2360	1260,6	897	1168,4
Indonesia		16214,8	19474,5	24564,7	28617,5	28529,7	29275,9	28964,1

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Lampiran D

Data Pengangguran di Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam persen)

NO	Provinsi	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	8,485	8,81	8,5	9,23	7,885	8,83	7,85
2	Sumatera Utara	7,72	7,825	6,355	6,27	6,09	6,55	6,165
3	Sumatera Barat	7,26	7,765	6,57	6,705	6,41	6,44	5,45
4	Riau	7,965	6,8	4,83	4,835	5,775	7,275	6,685
5	Jambi	4,92	4,305	3,445	3,825	3,79	3,535	4,33
6	Sumatera Selatan	6,6	6,445	5,63	5,125	4,4	5,55	4,125
7	Bengkulu	4,325	3,46	2,9	3,355	2,545	4,06	3,57
8	Lampung	5,76	5,95	5,205	5,38	4,935	4,29	4,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,935	3,585	3,125	3,435	3,905	4,82	4,385
10	Kepulauan Riau	7,055	6,29	5,395	5,84	5,975	7,625	8,36
11	DKI Jakarta	11,185	11,275	10,135	9,135	9,155	7,795	5,945
12	Jawa Barat	10,45	9,985	9,46	9,02	8,555	8,56	8,73
13	Jawa Tengah	6,535	6,625	5,755	5,77	5,565	5,15	4,415
14	DI Yogyakarta	5,855	4,965	3,94	3,495	2,745	4,07	2,765
15	Jawa Timur	4,58	4,81	4,135	4,135	4,105	4,39	4,175
16	Banten	13,905	13,68	10,31	9,655	9,47	9,065	8,435
17	Bali	3,315	2,975	2,165	1,88	1,635	1,68	2,005
18	Nusa Tenggara Barat	5,535	5,355	5,23	5,29	5,525	5,335	3,8
19	Nusa Tenggara Timur	3,415	2,935	2,785	2,685	2,615	3,475	3,42
20	Kalimantan Barat	5,06	4,915	3,48	3,56	3,285	4,965	4,405
21	Kalimantan Tengah	4,01	3,685	2,935	2,405	2,975	3,84	4,245
22	Kalimantan Selatan	5,57	6,015	4,765	3,77	3,915	4,875	4,54
23	Kalimantan Timur	10,275	11,165	9,25	8,445	8,135	7,335	8,405
24	Sulawesi Utara	10,045	9,92	8,265	7,145	7,405	8,86	7
25	Sulawesi Tengah	4,75	5,545	3,85	3,43	3,3	3,545	3,375
26	Sulawesi Selatan	8,18	7,51	6,285	5,49	5,435	5,88	4,955
27	Sulawesi Tenggara	4,69	4,57	3,67	3,905	3,28	4,585	3,25
28	Gorontalo	5,105	5,845	4,695	4,33	3,31	3,855	3,32
29	Sulawesi Barat	3,675	3,06	2,13	2,185	1,84	2,58	3,025
30	Maluku	9,55	9,495	7,65	8,44	8,55	8,325	7,015
31	Maluku Utara	6,03	5,57	5,16	4,65	5,47	5,805	3,72
32	Papua Barat	7,725	6,775	5,995	4,38	4,36	6,345	6,595
33	Papua	3,815	4,43	3,37	3,03	3,46	3,855	3,16
Indonesia		7,275	7,22	6,25	6,025	5,82	5,995	5,555

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Lampiran E

Hasil Uji Chow

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 231

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.098493	0.898252	4.562742	0.0000
X ₁	0.015525	0.016107	0.963891	0.3361
X ₂	6.87E-07	6.51E-07	1.054762	0.2927
X ₃	0.000630	0.000179	3.518021	0.0005
R-squared	0.179348	Mean dependent var		5.598961
Adjusted R-squared	0.168502	S.D. dependent var		2.323944
S.E. of regression	2.119123	Akaike info criterion		4.357046
Sum squared resid	1019.385	Schwarz criterion		4.416655
Log likelihood	-499.2388	Hannan-Quinn criter.		4.381089
F-statistic	16.53639	Durbin-Watson stat		0.215000
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 9

Lampiran F

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	48.290781	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X ₁	-0.054765	-0.071523	0.000022	0.0004
X ₂	-0.000005	-0.000000	0.000000	0.0000
X ₃	-0.000114	0.000014	0.000000	0.0001

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 231

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.00938	0.499694	20.03101	0.0000
X ₁	-0.054765	0.010432	-5.249870	0.0000
X ₂	-5.33E-06	1.28E-06	-4.175660	0.0000
X ₃	-0.000114	0.000116	-0.981489	0.3276

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.901041	Mean dependent var	5.598961
Adjusted R-squared	0.883279	S.D. dependent var	2.323944
S.E. of regression	0.793962	Akaike info criterion	2.518709
Sum squared resid	122.9234	Schwarz criterion	3.055189
Log likelihood	-254.9109	Hannan-Quinn criter.	2.735090
F-statistic	50.72893	Durbin-Watson stat	1.208061
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 9

Lampiran G

Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 231

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.00938	0.499694	20.03101	0.0000
X ₁	-0.054765	0.010432	-5.249870	0.0000
X ₂	-5.33E-06	1.28E-06	-4.175660	0.0000
X ₃	-0.000114	0.000116	-0.981489	0.3276

Effects Specification

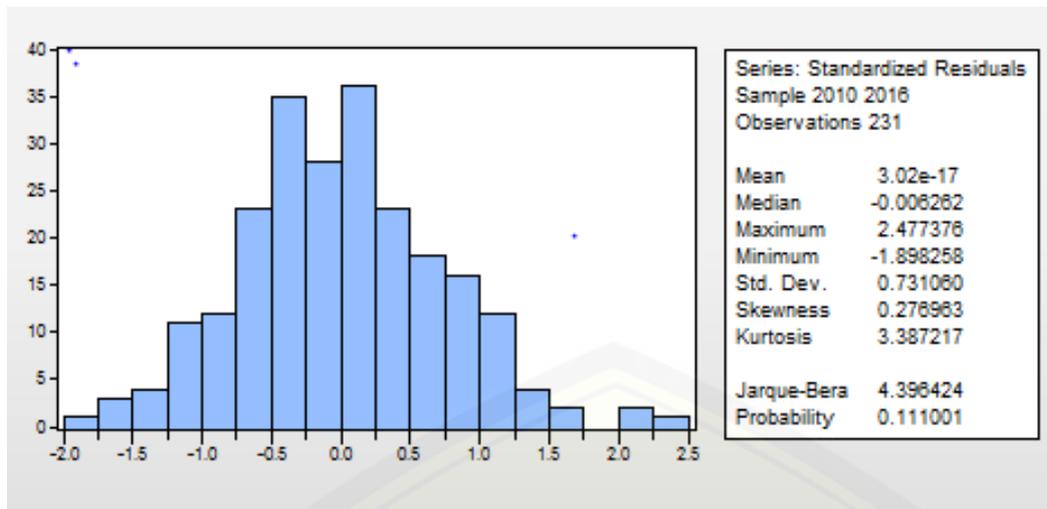
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.901041	Mean dependent var	5.598961
Adjusted R-squared	0.883279	S.D. dependent var	2.323944
S.E. of regression	0.793962	Akaike info criterion	2.518709
Sum squared resid	122.9234	Schwarz criterion	3.055189
Log likelihood	-254.9109	Hannan-Quinn criter.	2.735090
F-statistic	50.72893	Durbin-Watson stat	1.208061
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 9

Lampiran H

Uji Normalitas



Sumber: Eviews 9

Lampiran I

Uji Multikolinearitas

	Y	X₁	X₂	X₃
Y	1.000000	0.058159	0.364494	0.413832

X ₁	0.058159	1.000000	0.044978	-0.013581
X ₂	0.364494	0.044978	1.000000	0.775922
X ₃	0.413832	-0.013581	0.775922	1.000000

Sumber: Eviews 9



Lampiran J

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 231

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.500372	0.252577	1.981067	0.0490
X ₁	-0.000433	0.005273	-0.082211	0.9346
X ₂	6.21E-07	6.45E-07	0.962796	0.3368
X ₃	-7.51E-05	5.86E-05	-1.281115	0.2017

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.333677	Mean dependent var	0.572796
Adjusted R-squared	0.214081	S.D. dependent var	0.452689
S.E. of regression	0.401319	Akaike info criterion	1.154148
Sum squared resid	31.40603	Schwarz criterion	1.690628
Log likelihood	-97.30404	Hannan-Quinn criter.	1.370529
F-statistic	2.790029	Durbin-Watson stat	2.167143
Prob(F-statistic)	0.000004		

Sumber: Eviews 9

